LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
TAHUN 2012

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
KALIMANTAN SELATAN
2012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 18/Permentan/OT.140/2/2007 Tanggal 19 Februari 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian, BBPP Binuang adalah unit pelaksana teknis dibidang pertanian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian. BBPP Binuang mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur.

Dalam melaksanakan tugasnya BBPP Binuang menyelenggarakan fungsi : (1) Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kerjasama; (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; (3) Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian; (4) Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur pertanian; (5) Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di bidang pertanian bagi non aparatur pertanian; (6) Pelaksanaan pengembangan teknik pelatihan di bidang perkebunan dan teknologi pasang surut; (7) Pelaksanaan pengembangan teknik pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian; (8) Penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian; (9) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian; (10) Pelaksanaan pemberian konsultasi agribisnis; (11) Pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian; dan (12) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang.

Selaras dengan berpedoman pada visi pembangunan pertanian dan arah kebijakan pengembangan SDM Pertanian, serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pelatihan dibidang pertanian, maka BBPP Binuang mempunyai visi "*Menjadi Centre Of Exellent dalam menyelenggarakan pelatihan*

untuk menghasilkan SDM Pertanian yang Profesional, inovatif, mandiri dan berwawasan global". Untuk mewujudkan visi tersebut, BBPP Binuang menetapkan misi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, sebagai upaya untuk mewujudkan visi BBPP Binuang. Adapun Misi BBPP Binuang tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan kualitas rencana program, pemantauan evaluasi, pelaporan dan pengendalian; (2) Meningkatkan pelaksanaan kerjasama, jejaring kerja dan sistem informasi pertanian; (3) Mendayagunakan sumberdaya manusia (*brainware*), prasarana dan sarana (*hardware*) Balai dalam rangka pengembangan SDM pertanian; (4) Meningkatkan kompetensi ketenagaan pelatihan; (5) Meningkatkan kualitas pelaksanaan, sistem, prosedur dan norma penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan; (6) Meningkatkan kualitas pelayanan konsultasi agribisnis dan pengembangan pola/model, pelatihan teknis, dan kewirausahaan pertanian; dan (7) Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, manajemen, monitoring dan evaluasi. Selain visi dan misi BBPP Binuang menetapkan motto "*Tertib, Disiplin, Kompetensi dan Kinerja"*.

Mengacu pada visi dan misi BBPP Binuang tersebut, tujuan kegiatan BBPP Binuang adalah (1) Menghasilkan SDM aparatur dan non aparatur pertanian yang profesional; (2) Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya manusia (*brainware*), prasarana dan sarana (*hardware*) Balai dalam rangka pengembangan SDM pertanian; (3) Meningkatkan profesionalisme ketenagaan pelatihan dalam melaksanakan tugas dan fungsi; (4) Mengefektifkan rencana program, pemantauan evaluasi pelaporan dan pengendalian; (5) Memantapkan keberlanjutan kerjasama jejaring kerja dan sistem informasi pertanian; (6) Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Balai; dan (7) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan manajemen BBPP Binuang. Secara rinci rencana strategis BBPP Binuang 2010 – 2014 disajikan pada Lampiran 1.

Berdasarkan tujuan tersebut, lebih lanjut ditetapkanlah sasaran. Sasaran BBPP Binuang tahun 2011 mencakup 5 sasaran pokok dengan 29 indikator sasaran yang diupayakan melalui 29 kegiatan strategis (kegiatan yang bersumber pada dana DIPA T. A. 2011), secara rinci rencana kerja tahuanan BBPP Binuang tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan (HPK) selama tahun 2011 adalah bahwa kinerja 0,00% s.d. 107,00%. Secara rinci hasil PKK dapat dilihat pada Lampiran 3.

Realisasi total anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang pada tahun 2011 mencapai 87,77% atau Rp. 11.653.568.744,- dari target Rp. 13.278.139.000,- (pagu setelah direvisi).

Hasil analisis efisiensi kinerja kegiatan yaitu dilihat dari penggunaan anggaran yang efisien dalam melaksanakan kegiatan, yaitu berkisar antara 0,00% s.d. 100%. Hasil analisis efisiensi kinerja BBPP Binuang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 9.

Meskipun capaian kinerja kegiatan dalam kategori efisien, namun masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pada tahun 2011, dengan memperhatikan kendala yang dihadapi maka untuk tahun-tahun berikutnya perlu dilakukan antara lain : (1) peningkatan koordinasi antar masing-masing bagian lingkup BBPP Binuang dalam proses perencanaan, adanya acuan standar pelaksanaan kegiatan yang legal formal, perbaikan kualitas TOR untuk masing-masing kegiatan; (2) perlu lebih dikembangkan sistem data/informasi antar dinas/instansi (misalnya melalui pembentukan jejaring kerjasama data/informasi antar dinas/instansi terkait); (3) perlu lebih dikembangkan perencanaan bersama sejak awal; (4) pengendalian pelaksanaan kegiatan yang lebih intensif melalui pertemuan regular; dan (5) perlu komitmen di semua tingkatan manajemen.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2011 BBPP Binuang didukung oleh 70 orang PNS dan 20 orang THL, dengan komposisi sebagai berikut :

(1) Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Laki-laki = 69 orang dan Perempuan = 21 orang;

(2) Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari SD = 10 orang, SLTP = 11 orang, SLTA = 34 orang, S0 = 1 orang, S1/D4 = 26 orang dan S2 = 7 orang; dan S3 = 1 orang;

(3) Berdasarkan pangkat/golongan terdiri dari Golongan I = 8 orang, Golongan II = 17 orang, Golongan III = 34 orang dan Golongan IV = 11 orang.

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 19 Februari 2007 Balai Besar pelatihan Pertanian Binuang mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur. Hirarkhi BBPP adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan bagi aparatur dan non aparatur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.

Sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 dan dilengkapi oleh Peraturan Menteri (Permen) Pertanian Nomor: 65/Kpts/HK.030/3/2005, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2011. LAKIP Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2011.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Binuang, Januari 2013

Dr. Ir. Surachman Suwardi, MP
NIP. 199891863521o749126

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF.....
KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI .....
DAFTAR GAMBAR .....
DAFTAR TABEL .....
DAFTAR LAMPIRAN .....
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....
B. Tugas Fungsi .....
C. Organisasi dan Tata Kerja .....
D. Lingkungan Strategis .....

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJUAN KINERJA.....
A. Rencana Strategis .....
B. Rencana Kinerja Tahunan .....
C. Penetapan Kinerja .....

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Hasil Pengukuran Kinerja.....
B. Penilaian Pencapaian Kinerja .....
C. Analisis Kinerja .....
D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja .....

BAB IV. PENUTUP

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1. (isi tabel).....
Tabel 2. (isi tabel).....

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1. (isi gambar) .....

DAFTAR LAMPIRAN

halaman

1. (Isi lampiran) .....
2. (Isi lampiran) .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Berdiri sejak tahun 1952 dengan nama Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD), diperbaharui menjadi Pusat Kursus Pertanian Kalimantan (PKPK) pada tahun 1953, dan pada tahun 1969 diganti lagi menjadi Pusat Pengembangan Pertanian. Seiring pesatnya perkembangan zaman khususnya pertanian, pada tahun 1975 berdasarkan SK Mentan No. 190/Kpts/Org./5/1975 berubah lagi menjadi Pusat Latihan Pertanian (PLP). Dengan terbitnya SK Mentan No. 52/Kpts/Org./1/1978 tanggal 28 Januari 1978 lembaga ini berganti nama menjadi Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) Binuang. Namun dengan terbitnya SK Mentan No. 84/Kpts/OT.210/2/2000 tanggal 29 Pebruari 2000 lembaga ini berganti nama menjadi Balai Diklat Pertanian (BDP) Binuang. Sampai pada tahun 2002, dengan terbitnya SK Mentan No. 333/Kpts/OT.210/5/2002 tanggal 8 Mei 2002 berganti nama lagi menjadi Balai Diklat Agribisnis Perkebunan dan Teknologi Pasang Surut (BDAPTPS) Binuang. Terakhir, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian RI No. 18/Permentan/OT.140/2/2007 pada tanggal 19 Pebruari 2007 lembaga ini resmi berganti nama menjadi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang dan eselonnya naik menjadi II/B dengan wilayah kerja regional Kalimantan.

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga. AKIP (Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Jadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini dibuat sebagai pertanggungjawaban dari setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan kegiatan.

Dasar hukum penyusunan LAKIP antara lain : (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) No. 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 203/M.PAN/7/2003, tanggal 24 Juli 2002 perihal pelaksanaan LAKIP; (3) Surat Keputusan No. 589/IX/6/Y/99, tanggal 20 September 1999, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan diubah dengan Keputusan No. 230/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (4) Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Kpts/HK.030/3/2005, tentang Petunjuk Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Departemen Pertanian.

B. Tugas dan Fungsi

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur. Berdasarkan tugas tersebut, fungsi yang dijalankan oleh BBPP Binuang meliputi :

1. Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kerjasama;
2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
4. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur pertanian;
5. Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di bidang pertanian bagi non aparatur pertanian;
6. Pelaksanaan pengembangan teknik pelatihan di bidang perkebunan dan teknologi pasang surut;
7. Pelaksanaan pengembangan teknik pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
8. Penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian;
9. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian;
10. Pelaksanaan pemberian konsultasi agribisnis;
11. Pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
12. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang.

C. Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi BBPP Binuang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang adalah sebagai berikut

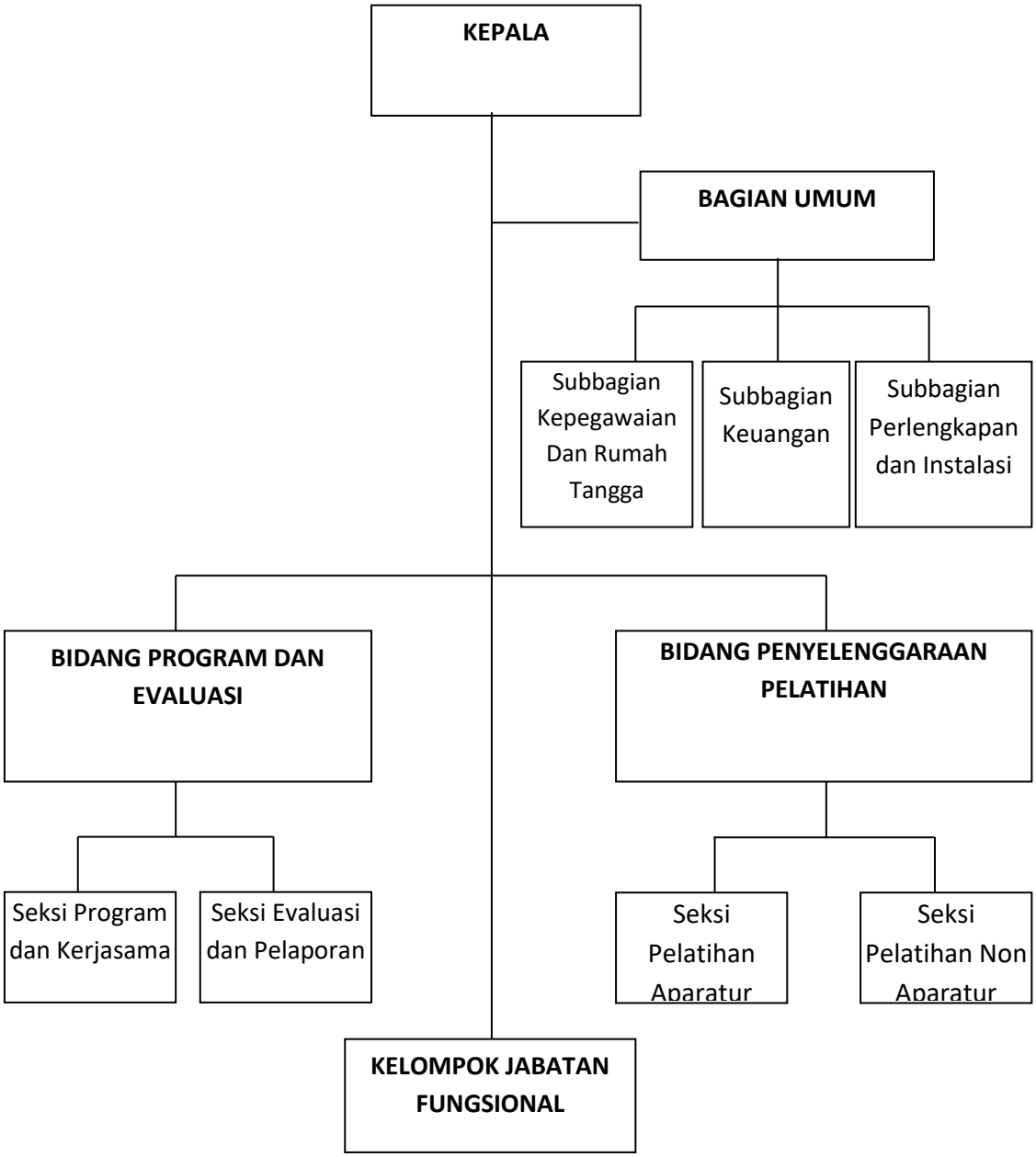
KEPALA
BAGIAN UMUM
Subbagian Kepegawaian Dan Rumah Tangga
Subbagian Keuangan
Subbagian Perlengkapan dan Instalasi
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI
BIDANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN
Seksi Program dan Kerjasama
Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Seksi Pelatihan Aparatur
Seksi Pelatihan Non Aparatur
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BBPP Binuang terdiri dari empat (4) unit kerja yaitu Bagian Umum, Bidang Program dan Evaluasi, Bidang Penyelenggaraan Pelatihan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun kegiatan masing-masing bagian/unit kerja secara rinci menurut Peraturan Kepala Badan pengembangan SDM Pertanian No : 20/Per/OT.130/J/2/08 Tanggal 01 Februari 2008 Tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum
   a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.

      Rincian tugas pekerjaan tersebut adalah :
      - Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga;
      - Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
      - Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan pegawai;
      - Melakukan urusan mutasi pegawai;
      - Melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
      - Melakukan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) BBPP Binuang;
      - Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
      - Melakukan urusan tata usaha;
      - Melakukan urusan keprotokolan;
      - Melakukan urusan kehumasan;
      - Melakukan penyiapan bahan organisasi dan tatalaksana BBPP Binuang;
      - Melakukan urusan rumah tangga;
      - Melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga.
   b. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

      Rincian tugas pekerjaan adalah:
      - Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan;
      - Melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan;
      - Melakukan urusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- Melakukan urusan penyiapan pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Melakukan urusan pembayaran gaji;
- Melakukan verifikasi tanda bukti pengeluaran dan dokumen pendukung;
- Melakukan penyiapan bahan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Neraca Keuangan dan Sistem Monitoring Evaluasi (SIMONEV) Keuangan;
- Melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keuangan.

c. Subbagian Perlengkapan dan Instalasi, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan instalasi.

   Rincian tugas pekerjaan tersebut adalah :

   - Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Perlengkapan dan Instalasi;
   - Melakukan urusan pengadaan barang/jasa;
   - Melakukan urusan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);
   - Melakukan penghapusan BMN;
   - Melakukan urusan pemanfaatan BMN;
   - Melakukan penyiapan bahan penyusun laporan kekayaan negara;
   - Melakukan urusan instalasi pelatihan (Perpustakaan, Laboratorium, Bengkel Latih/Kerja, Lahan Praktik, Green Hause, Unit Pembibitan dan Unit-unit Produksi lainnya);
   - Melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perlengkapan dan Instalasi.

2. Bidang Program dan Evaluasi

   a. Seksi Program dan Kerjasama, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan kerjasama.

      Rincian tugas pekerjaan tersebut adalah :

      - Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Program dan Kerjasama;
      - Melakukan penyiapan bahan penyusunan program BBPP Binuang;
      - Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan identifikasi kebutuhan pelatihan BBPP Binuang;

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran BBPP Binuang;
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama;
- Melakukan penyiapan bahan publikasi dan sosialisasi informasi kegiatan pelatihan SDM Pertanian di BBPP Binuang;
- Melakukan penyusunan laporan kegiatan Seksi Program dan Kerjasama.

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi pelatihan, serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

   Rincian tugas pekerjaan tersebut adalah :

   - Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
   - Melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pelatihan BBPP Binuang;
   - Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
   - Melakukan penyiapan bahan penyusunan bimbingan lanjutan dan evaluasi kegiatan lapangan;
   - Melakukan penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan BBPP Binuang;
   - Melakukan penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBPP Binuang;
   - Melakukan penyusunan laporan kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan

a. Seksi Pelatihan Aparatur, mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis dan fungsional dibidang pertanian bagi aparatur pertanian.

   Rincian tugas pekerjaan tersebut adalah :

   - Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelatihan Aparatur;
   - Melakukanp pemberian pelayanan pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur pertanian;
   - Melakukan pemberian pelayanan pengembangan teknik pelatihan teknis dan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;

- Melakukan pemberian pelayanan administrasi kepesertaan dan alumni pelatihan teknis dan fungsional dibidang pertanian bagi aparatur pertanian;
- Melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan dan kegiatan Seksi Pelatihan Aparatur.

b. Seksi Pelatihan Non Aparatur, mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan dibidang pertanian bagi non aparatur pertanian.

Rincian tugas pekerjaa tersebut adalah :

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelatihan Non Aparatur;
- Melakukan pemberian pelayanan pelaksanaan pelatihan teknis dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi non aparatur pertanian;
- Melakukan pemberian pelayanan pengembangan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi non aparatur;
- Melakukan pemberian pelayanan administrasi kepesertaan dan alumni pelatihan teknis dan kewirausahaan dibidang pertanian bagi non aparatur pertanian;
- Melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan dan kegiatan Seksi Pelatihan Non Aparatur.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional widyaiswara dan instruktur, serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Permentan No : 18/Permentan/OT.140/2/2007 Tanggal 19 Februari 2007, kelompok jabatan fungsional widyaiswara dan instruktur mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melakukan pelatihan teknis dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- Melakukan pelatihan fungsional dibidang pertanian bagi aparatur pertanian;
- Melakukan pelatihan kewirausahaan dibidang pertanian bagi non aparatur pertanian;

- Menyusun bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan dibidang pertanian;
- Menyusun paket pembelajaran dan media pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan dibidang pertanian;
- Melakukan pengembangan teknik pelatihan dibidang perkebunan dan teknologi pasang surut;
- Melakukan pengembangan teknik pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- Melakukan pemberian konsultasi agribisnis;
- Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2010 BBPP Binuang didukung oleh tujuh puluh (70) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dua puluh (20) orang Tenaga Harian Lepas (THL), dengan komposisi seperti pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini :

Tabel 1. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	**Laki-laki (Orang)**	**Perempuan (Orang)**	**Jumlah (Orang)**
PNS	53	17	70
THL	16	4	20
Jumlah	**69**	**21**	**90**

Tabel 2. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	PNS (Orang)	THL (Orang)	Jumlah (Orang)
SD	6	4	**10**
SLTP	3	8	**11**
SLTA	26	8	**34**
S0 / Diploma	1	-	**1**
S1 / D4	26	-	**26**
S2	7	-	**7**

S3	1	-	**1**
Jumlah	**70**	**20**	**90**

Tabel 3. Komposisi Pegawai BBPP Binuang Berdasarkan Pangkat / Golongan

Pangkat	Golongan	PNS (Orang)
Juru Muda	I/a	-
Juru Muda Tk.I	I/b	3
Juru	I/c	4
Juru Tk. I	I/d	1
Pengatur Muda	II/a	5
Pengatur Muda Tk. I	II/b	7
Pengatur	II/c	3
Pengatur Tk. I	II/d	2
Penata Muda	III/a	11
Penata Muda Tk. I	III/b	10
Penata	III/c	10
Penata Tk. I	III/d	3
Pembina	IV/a	5
Pembina Tk. I	IV/b	3
Pembina Utama Madya	IV/c	3
Pembina Utama	IV/d	-
Jumlah		**70**

Tabel 4. Pejabat Fungsional (Widyaiswara/Instruktur) Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan Fungsional	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Instruktur Penyelia	-	1	1
Widyaiswara Pertama	-	-	-
Widyaiswara Muda	2	1	3
Widyaiswara Madya	6	-	6

Widyaiswara Utama	-	-	-
Jumlah	**8**	**2**	**10**

Tabel 5. Pejabat Fungsional (Widyaiswara/Instruktur) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
SLTA	-	1	1
S0 (D-1, D-2, D-3)	-	-	-
S1 / D4	3	1	4
S2	5	-	5
S3	-	-	-
Jumlah	**8**	**2**	**10**

D. Lingkungan Strategis Organisasi

Lingkungan strategis organisasi Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam konteks organisasi lingkungan internal positif yaitu kekuatan (Strenght) yang dimiliki oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang dalam pelaksanaan pengembangan SDM Pertanian yaitu :

1. Kelembagaan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang mempunyai wilayah kerja yang membantu dalam rangka pengembangan SDM Pertanian. Wilayah kerja tersebut yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Dimana di wilayah kerja tersebut memiliki lembaga diklat (BDP) yang dimiliki oleh pemerintah daerah, serta beberapa kelembagaan petani seperti P4S, Gapoktan dan LM3.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2012 Balai Besar Pelatihan Pertannian Binuang didukung oleh 67 orang PNS dan 20 orang tenaga harian lepas. Serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dan anggaran yang mendukung.

Adapun lingkungan internal organisasi yang negative yaitu kelemahan (Weaknesses) dalam pelaksanaan kegiatan saat ini meliputi :

1. Terbatas dan belum meratanya kesempatan pengembanmgan kemampuan bagi petugas.
2. Belum optimalnya kerjasama dengan berbagai pihak.

Kemudian lingkungan strategis eksternal organisasi yang positif yaitu peluang (Oportunities) dalam kegiatan yaitu:

1. Keberadaan Balai Diklat Pertanian (BDP) milik pemerintah Daerah, P4S, LM3 dan Gapoktan daerah yang mendukung pengembangan SDM Pertanian
2. Keberadaan petugas dan penyuluh pertanian, penyuluh swadaya yang mendukung kegiatan di daerah.
3. Dukungan kerjasama dengan BDP, P4S, LM3 dan Gapoktan, dll

Sedangkan lingkungan strategis eksternal organisasi yang negative yaitu tantangan (Thteats) dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Kualitas sebagian besar petani masih rendah terutama di bidang pendidikan formal.
2. Kurangnya minat generasi muda pada bidang pertanian.
3. Lemahnya aksebilitas petani pada lembaga permodalan, lembaga penyedia sarana dan prasarana serta lembaga pemasaran dan informasi/teknologi.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Stratejik (Renstra)

Rencana Strategik Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2010 – 2014 disusun dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Visi

Visi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang sebagai berikut:

"Menjadi Centre Of Exellent dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang Profesional, inovatif, mandiri dan berwawasan global".

2. Misi

Dalam mewujudkan visi, Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang menetapkan misi yang akan dilaksnakan dalam kurun waktu 2010 - 2014 adalah :

1. Meningkatkan kualitas rencana program, pemantauan evaluasi, pelaporan dan pengendalian.
2. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama, jejaring kerja dan sistem informasi pertanian.
3. Mendayagunakan sumberdaya manusia *(brainware),* prasarana dan sarana *(hardware)* Balai dalam rangka pengembangan SDM Pertanian..
4. Meningkatkan kompetensi ketenagaan pelatihan.
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan, sisten dan prosedur dan norma penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan teknik pelatihan teknis, fungsional, kewirausahaan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan konsultasi agribisnis dan pengembangan pola/model, pelatihan teknis, dan kewirausahaan pertanian.
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, manajemen dan monev.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan mengacu kepada visi dan misi maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai BBPP Binuang akan dirumuskan dengan kreteria sebagai berikut :

1. Mengefektifkan rencana program, pemantauan, evaluasi pelaporan dan pengendalian.
2. Memantapkan keberlanjutan kerjasama, jejaring kerja dan sistem informasi pertanian.
3. Meningkatkan pendayagunakan sumberdaya manusia *(brainware),* prasarana dan sarana *(hardware)* Balai dalam rangka pengembangan SDM Pertanian.
4. Meningkatkan profesionalisme ketenagaan pelatihan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
5. Menghasilkan SDM aparatur dan non aparatur pertanian yang profesional.
6. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap balai.
7. Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan manajemen BBPP.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh BBPP Binuang dalam bentuk rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu 1 (satu) tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yang diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mengembangkan dan mendayagunakan SDM pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kerja Tahun 2010 s.d2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	• Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan daerah yang difasilitasi dan dikembangkan • Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya
2. Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi	Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan
3. Terfasilitasinya Aparatur dan Non Aparatur dalam Mengikuti Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan kompetensi Kerja.	• Jumlah Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan Pertanian • Jumlah non Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Pertanian
4. Tersusunnya Dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	Jumlah Dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantapan system Pelatihan Pertanian
5. Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Jumlah waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kerja Tahun 2010 s.d 2014 per tahun

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	• Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan daerah yang difasilitasi dan dikembangkan • Jumlah					

	kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya					
2. Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi	Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan					
3. Terfasilitasinya Aparatur dan Non Aparatur dalam Mengikuti Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan kompetensi Kerja.	• Jumlah Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan Pertanian • Jumlah non Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Pertanian					
4. Tersusunnya Dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	Jumlah Dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantapan system Pelatihan Pertanian					
5. Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Jumlah waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran					

5. Kebijakan dan Strategi

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang diselenggarakan BBPP Binuang pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- Pemantapan sistem penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- Pendayagunaan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian;
- Penajaman pelaksanaan program kerjasama dan sistem informasi pelatihan pertanian;
- Penguatan fungsi pelayanan dan konsultasi agribisnis; dan
- Penguatan sistem administrasi dan manajemen BBPP Binuang.

6. Program dan Kegiatan

Program yang diselenggarakan BBPP Binuang pada tahun 2010 adalah peningkatan kesejahteraan petani.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Mengacu kepada Renstra BBPP Binuang dan Renstra BPPSDMP Tahun 2010-2014, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPP Binuang untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut (Tabel 3)

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan BBPP Binuang

Unit Eselon I : Badan PPSDMP

Unit Eselon II : BBPP Binuang

Tahun : 2012

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	• Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan daerah yang difasilitasi dan dikembangkan • Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S)	1 unit 17 unit

		yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya	
2.	Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi	Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	28 orang
3.	Terfasilitasinya Aparatur dan Non Aparatur dalam Mengikuti Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan kompetensi Kerja.	• Jumlah Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan Pertanian • Jumlah non Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Pertanian	1.445 orang 1.294 orang
4.	Tersusunnya Dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	Jumlah Dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantapan system Pelatihan Pertanian	18 Dokumen
5.	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Jumlah waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran	12 bulan

C. Penetapan Kinerja

Dokumen Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala Balai BBPP Binuang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja disusun setelah DIPA diterbitkan, dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/oerjanjian kinerja dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4. Penetapan Kinerja Pusat (UPT)

Unit Eselon I : Badan PPSDMP

Unit Eselon II : BBPP Binuang

Tahun Anggaran : 2012

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	• Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan daerah yang difasilitasi dan dikembangkan • Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya	1 unit 17 unit
2.	Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi	Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	28 orang
3.	Terfasilitasinya Aparatur dan Non Aparatur dalam Mengikuti Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan kompetensi Kerja.	• Jumlah Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan Pertanian • Jumlah non Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Pertanian	1.445 orang 1.294 orang
4.	Tersusunnya Dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	Jumlah Dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantapan system Pelatihan Pertanian	18 Dokumen
5.	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Jumlah waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran	12 bulan

Jumlah Anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2012 sebesar : Rp. 22.427.143.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Pengukuran Kinerja

Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang pada tahun 2012 disajikan pada table 4 berikut ini :

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja UPT (Pusat)

Unit Eselon I : Badan PPSDMP

Unit Eselon II : BBPP Binuang

Tahun Anggaran : 2012

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	• Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan daerah yang difasilitasi dan dikembangkan • Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya	1 unit 17 unit	1 unit 0 unit	100 0
2.	Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi	Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	28 orang	74 orang	264
3.	Terfasilitasinya Aparatur dan Non Aparatur dalam Mengikuti Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan kompetensi Kerja.	• Jumlah Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan Pertanian • Jumlah non Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Pertanian	1.445 orang 1.294 orang	1.055 orang 1.075 orang	87 83

4.	Tersusunnya Dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	Jumlah Dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantapan system Pelatihan Pertanian	18 Dokumen	16 Dokumen	84
5.	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Jumlah waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran	12 bulan	10 bulan	83

Jumlah Anggaran Program Tahun : Rp.21.193.686.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun : Rp. 16.653.809.651

B. Penilaian Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dakam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud nerupakan hasil dari suatu penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup 2 (dua) hal yaitu (1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan; dan (2) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan, realisasi berkisar 0,00% s.d. 264,00%. Realisasi terendah adalah 0,00% dicapai oleh kegiatan Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani(P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya, hal ini menunjukkan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Sedangkan realisasi tertinggi adalah 264,00%, dicapai oleh kegiatan Terklasifikasinya ketenagaan pelatihan pertanianyang difasilitasi dan dikembangkan.

C. Analisis Kinerja

BBPP Binuang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Pertanian, oleh sebab itu BBPP Binuang ikut mendukung dan mewujudkan apa yang menjadi visi Kementerian Pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun program kerja yang operasional sebagai implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program BBPP Binuang merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari program peningkatan kesejahteraan petani. Pada tahun 2011 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan 5 sasaran pokok dan 7 indikator sasaran.

Pada tahun 2011 pencapaian kinerja kegiatan BBPP Binuang berkisar 0,00% sampai dengan 107,00% sedangkan pada tahun 2012 pencapaian kinerja kegiatan BBPP Binuang berkisar 0,00% sampai dengan 264,00%, ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja kegiatan di BBPP Binuang.

D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

Realisasi total anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang pada tahun 2011 mencapai 87,77% atau Rp. 16.653.809.651,- dari target Rp. 21.193.686.000,- (pagu setelah direvisi).

Pada tahun 2012, Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang melaksanakan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani yang dijabarkan lebih lanjut menjadi 5 sasaran dan 7 indikator sasaran. Perhitungan pencapaian kinerja sasaran dan

kegiatan strategis tersebut dilakukan secara bertingkat dengan menggunakan 3 formulir, yaitu formulir Rencana Stratejik (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Pengukuran Kinerja (PK).

Pengukuran Kinerja (PK) pengembangan SDM Pertanian tahun 2012 adalah kinerja berkisar 0,00% s.d. 265,0% sedangkan efisiensi capaian indikator kinerja berkisar 0,00 % s.d. 100 %**.**

Table 7. Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan BBPP Binuang Tahun 2012

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Efisiensi
1.	Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	• Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan daerah yang difasilitasi dan dikembangkan • Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya	347.302.000 67.526.000	159.246.390 410.000	100 0	
2.	Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi	Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	464.650.000	246.314.258	264	
3.	Terfasilitasinya	• Jumlah	5.698.884.000	5.192.523.250	87	

	Aparatur dan Non Aparatur dalam Mengikuti Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan kompetensi Kerja.	Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan Pertanian • Jumlah non Aparatur Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Pertanian	4.837.650.000	3.710.922.306	83	
4.	Tersusunnya Dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	Jumlah Dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantapan system Pelatihan Pertanian	2.005.802.000	1.557.255.050	84	
5.	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Jumlah waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran	7.771.872.000	5.747.728.988	83	

Dari Tabel 9 diketahui bahwa hampir semua kegiatan yang terlaksana capaian kinerjanya termasuk dalam kategori efisien, kecuali ada kegiatan yang tidak efisien karena kegiatan tersebut memang tidak terlaksana yaitu kegiatan bimbingan lanjutan.

Meskipun capaian kinerja termasuk dalam kategori efisien, namun masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Masalah tersebut antara lain :

1. Proses perencanaan belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang terintegrasi dengan baik. Dimasa yang akan datang perlu diupayakan : (a) peningkatan koordinasi antar masing-masing bagian lingkup BBPP Binuang dalam proses perencanaan; (b) adanya acuan standar pelaksanaan kegiatan yang legal formal; (c) perbaikan kualitas TOR untuk masing-masing kegiatan;
2. Perencanaan kurang didukung oleh data hasil evaluasi, sehingga beberapa kali terjadi revisi kegiatan. Dimasa yang akan datang perlu lebih dikembangkan sistem data/informasi antar Dinas/Instansi terkait (misalnya melalui pembentukan jejaring kerjasama data/informasi antar Dinas/Instansi terkait);
3. Belum adanya sinergitas antar program yang dituangkan dalam uraian kegiatan dilingkup BBPP Binuang, karena tidak ada konsistensi terhadap rencana stratejik, sehingga kegiatan bersifat parsial dan kurang saling terkait satu sama lain. Dimasa yang akan datang perlu lebih dikembangkan perencanaan bersama sejak awal;
4. Belum adanya sistem, mekanisme dan kerangka kerja tahunan, sehingga kegiatan-kegiatan kurang menggambarkan keterkaitan dalam program peningkatan kesejahteraan petani. Dimasa yang akan datang perlu disusun sistem, mekanisme dan kerangka kerja yang baik. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga beberapa kegiatan dilaksanakan mendekati batas akhir waktu pencairan dana. Dimasa yang datang perlu ditingkatkan; (a) pengendalian pelaksanaan kegiatan yang lebih intensif melalui pertemuan regular; (b) komitmen di semua tingkatan manajemen.

BAB IV
PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang tahun 2011, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban BBPP Binuang.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan dapat diketahui bahwa realisasi berkisar 0,00% s.d. 107,00%; sedangkan efisiensi kinerja pada BBPP Binuang pada tahun 2011 yang terdiri dari 5 sasaran pokok dan 29 indikator sasaran, berkisar antara 0,00% s.d. 100%. Pencapaian kinerja tertinggi dicapai oleh : (1) Terklasifikasikannya dan terselenggarakannya pembinaan lembaga pelatihan swadaya; (2) Terselenggarakannya kegiatan peningkatan profesionalisme petugas struktural. Adapun kegiatan tahun 2011 yang tidak tercapai adalah Bimbingan lanjutan pelatihan.

Meskipun capaian kinerja kegiatan dalam kategori efisien, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pada tahun 2011, dengan memperhatikan kendala yang dihadapi maka untuk tahun-tahun berikutnya perlu dilakukan antara lain: (1) peningkatan koordinasi antar masing-masing bagian lingkupBBPP Binuang dalam proses perencanaan, adanya acuan standar pelaksanaan kegiatan yang legal formal, perbaikan kualitas TOR untuk masing-masing kegiatan; (2) perlu lebih dikembangkan sistem data/informasi antar Dinas/Instansi terkait (misalnya melalui pembentukan jejaring kerjasama data/informasi antar Dinas/Instansi terkait); (3) perlu lebih dikembangkan perencanaan bersama sejak awal; (4) pengendalian pelaksanaan kegiatan yang lebih intensif melalui pertemuan regular; dan (5) komitmen di semua tingkatan manajemen.